



## **Pola Politik Uang Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Arsalim Universitas Sulawesi Tenggara <a href="mailto:dr.arsalim2021@gmail.com">dr.arsalim2021@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Muh.Nasir Andi Baso Universitas Sulawesi Tenggara <a href="mailto:basonasir1@gmail.com">basonasir1@gmail.com</a>	
Erfain Universitas Sulawesi Tenggara <a href="mailto:Erfain79@gmail.com">Erfain79@gmail.com</a>	
Muhammad Fauzan Universitas Sulawesi Tenggara <a href="mailto:Ucang236@gmail.com">Ucang236@gmail.com</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Arsalim, Baso, M. N. A., Erfain, & Fauzan, M. (2025). Pola Politik Uang Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4533-4539.

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Pola Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Konawe Selatan yang membahas permasalahan tentang bagaimana pola politik uang di Pilkada 2024: dari serangan fajar hingga bantuan sosial dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dari wawancara diorganisasikan, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan pola politik uang Pilkada serentak 2024 di Kab. Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; politik uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan dilakukan dengan berbagai pola, seperti pembagian uang tunai dan barang; Sebagian besar responden menganggap politik uang adalah hal biasa, meskipun ada yang menilai praktik ini merusak demokrasi; Politik uang berdampak negatif pada kualitas demokrasi dan legitimasi pemimpin terpilih.; Persepsi masyarakat Konawe Selatan terhadap politik uang terbagi dua yaitu mayoritas permisif yang menganggapnya sebagai hal biasa dalam Pilkada, dan minoritas kritis yang menilai politik uang merusak demokrasi serta menghasilkan pemimpin tidak berkualitas; Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan yaitu tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, pengalaman politik dan pengaruh lingkungan sosial. Dalam penelitian ini juga disarankan yaitu; 1). KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan serta sosialisasi tentang bahaya politik uang. 2) Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran politik agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberian uang atau barang. 3) Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku politik uang. 4) Perlunya evaluasi sistem pemilu langsung pada Pemilu 2029.

**Kata Kunci :** Pola, Politik Uang, Pilkada, Serangan Fajar, Kabupaten Konawe Selatan

### Abstract

This study, titled Patterns of Money Politics in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in South Konawe Regency, examines issues related to the patterns of money politics in the 2024 Pilkada—from vote-buying at dawn ("serangan fajar") to the distribution of social assistance—and the factors that contribute to the occurrence of money politics in the 2024 Pilkada in South Konawe Regency. The collected data were analyzed using qualitative analytical methods with a descriptive approach. Interview data were organized, analyzed, and presented in a narrative form illustrating the patterns of money politics in the 2024 simultaneous Pilkada in South Konawe Regency. The results of the study indicate that money politics in the 2024 Pilkada in South Konawe Regency occurred in various forms, such as the distribution of cash and goods. Most respondents considered money politics to be a common practice, although some viewed it as damaging to democracy. Money politics negatively affects the quality of democracy and the legitimacy of elected leaders. Public perceptions in South Konawe regarding money politics were divided: the majority were permissive and saw it as a normal part of Pilkada, while a minority were critical, viewing money politics as harmful to democracy and producing low-quality leaders. Factors influencing public perceptions in the 2024 Pilkada in South Konawe Regency include education level, economic conditions, political experience, and the influence of the social environment. The study also recommends: (1) The General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) should strengthen monitoring and conduct more intensive public outreach on the dangers of money politics. (2) The public should improve political awareness to avoid being easily influenced by monetary or material incentives. (3) Law enforcement must be strictly applied to perpetrators of money politics. (4) An evaluation of the direct election system is needed for the 2029 elections.

**Keywords:** Patterns, Money Politics, Pilkada, Vote-Buying, South Konawe Regency

### A. Pendahuluan

Pemilihan umum dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokratis karena empat alasan [4]; Pertama, pemilu merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, baik yang akan duduk dalam lembaga legislative maupun eksekutif dipusat dan daerah untuk bertindak atas nama rakyat dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Kedua, pemilu merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga penyelenggara negara, baik dipusat maupun daerah untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. Ketiga, Pemilu merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertur/tertib dan periodik baik perubahan berupa sirkulasi elit politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Keempat, pemilu juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme engineering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku yang disepakati bersama.

Dalam penelitian ini difokuskan hanya pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024. Meskipun demikian penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia ini bukan yang pertamakali tetapi sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sejak bulan Juni 2005. Hal baru dalam Pilkada tahun 2024 adalah pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota secara bersamaan yang berjumlah 1.553 pasangan calon (paslon). Jumlah total daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah sebanyak 545, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.[5]

Meskipun Pilkada telah menghasilkan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, namun masih menyisakan noda-noda hitam demokrasi yaitu lahirnya pemimpin akibat proses transaksional dengan pemilih dalam bentuk politik uang. Perilaku politik seperti ini memunculkan ancaman yakni *pseudo democracy*. Hal itu terjadi lantaran penikmat demokrasi, pada kenyataannya ialah segelintir kaum elite saja. Biaya seseorang untuk maju kedalam gelanggang pemilu diyakini sangatlah tinggi. Karena faktor tingginya cost politik itulah demokrasi di Indonesia masih memiliki catatan serius.[6]

Demokrasi yang sehat haruslah berjalan sehat tahapan pemilunya, termasuk kontestasinya. Tanpa itu, demokrasi hanyalah pepesan kosong nan semu. Suara merupakan komoditas utama dalam mempengaruhi elektoral. Umumnya para calon melakukan segala cara demi memperoleh suara. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui praktik politik uang. Dalam konteks elektoral, politik uang merupakan alat pembelian suara yang dimaknai sebagai bantuan politis dan wujud timbal balik (reciprocity) atau sebuah pertukaran sosial yang memang biasa terjadi dalam realitas permainan politik.

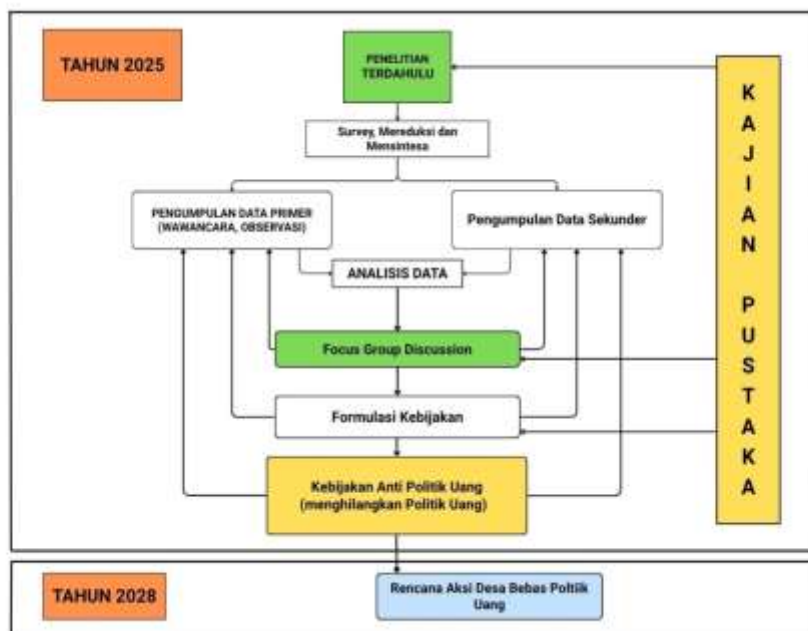
Berkaitan dengan fenomena Pilkada 2024 dengan maraknya apa yang disebut dengan serangan fajar dan bantuan sosial, maka menarik diteliti pola politik uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan. Dasar penelitian adalah adanya keinginan kuat dari stakeholder untuk mengevaluasi system pemilu di Indonesia karena maraknya transaksi politik berupa politik uang sehingga menciptakan ancaman pseudo demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang kurang legitimate dan tidak berkualitas. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah ; 1) Bagaimana pola politik uang di Pilkada 2024: dari serangan fajar hingga bantuan sosial di Kabupaten Konawe Selatan. 2) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan.

## B. Metodologi

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara. Populasi adalah seluruh wajib pilih di Pilkada serentak 2024. Mengingat banyaknya jumlah populasi, maka dilakukan penarikan sampel secara sengaja (purposive random sampling sebanyak 50 responden). Untuk mendapatkan data penelitian baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 1) Study Kepustakaan (Library Study) yakni mengumpulkan data-data dengan cara membaca, menelaah dokumen, dan menguji data-data hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tulisan ini, 2) Study Lapangan, yakni pengumpulan data secara langsung di lapangan, dengan menggunakan metode, sebagai berikut : a) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan terpilih. b) Quesioner yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan terstruktur dan diedarkan kepada para responden dan c).Dokumentasi yaitu mencatat dokumen berupa bahan/laporan yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dari wawancara diorganisasikan, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan pola politik uang Pilkada serentak 2024 di Kab. Konawe Selatan. Menurut Moleong [7], analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilaksanakan ataupun terjadi secara bersamaan. Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini: 1). Reduksi Data, kegiatan proses pemilihan, fokusing, dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan sebagaimana yang dikatakan Sugiyono [8]. Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih atau merangkum, memfokuskan, dan membuang data yang tidak perlu dimasukan dalam hasil wawancara antara peneliti dengan informan. 2) Display Data, menurut Miles, Huberman, dan Saldana [9], biasanya penyajian dalam penelitian kualitatif ialah menyajikan data dengan teks yang bersifat narasi. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. 3) Penarikan kesimpulan akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian ini, data yang telah diproses mulai dari reduksi data, penyajian data (display data), sampai dengan penarikan yaitu tujuannya untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian akan diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil atau ditarik tidak menyimpang dari tujuan utama yaitu permasalahan penelitian.

Bagan alir penelitian tampak pada gambar berikut:



**C. Hasil dan Pembahasan**

**1. Hasil**

Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Dengan luas wilayah sekitar 4.517 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 300 ribu jiwa, Konsel menjadi salah satu daerah dengan potensi pemilih yang signifikan di provinsi ini. Konsel terdiri dari 25 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari pesisir hingga pegunungan, sehingga penyelenggaraan Pilkada di daerah ini menuntut kerja logistik yang tidak sederhana.

KPU Konawe Selatan menetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 sebanyak 222.821 dengan rincian 113.028 laki-laki dan 109.793 perempuan yang tersebar di 25 kecamatan. Jumlah ini tersebar di seluruh kecamatan dengan ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus disiapkan untuk menjamin hak suara warga. Besarnya jumlah pemilih ini menjadikan Konsel sebagai salah satu daerah strategis dalam peta politik Sulawesi Tenggara. Terbagi dalam 336 Desa dan 15 Kelurahan, dengan topografi pesisir hingga pegunungan, pelaksanaan Pilkada di Konsel menuntut kesiapan logistik yang matang.

Pilkada 2024 di Konsel menghadirkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, setelah Bupati petahana, Surunuddin Dangga, tidak dapat mencalonkan kembali karena telah menjabat dua periode. Hal ini membuka ruang kompetisi yang lebih terbuka bagi kandidat baru maupun tokoh lokal. Setelah proses tahapan pencalonan dan pengundian nomor urut, persaingan berlangsung ketat. Pada akhirnya, pasangan Irham Kalenggo – Wahyu Ade Pratama ditetapkan sebagai pemenang dan akan memimpin Konsel periode 2025–2030.

Secara ekonomi, Konsel dikenal sebagai salah satu daerah penghasil hasil pertanian dan perkebunan utama di Sulawesi Tenggara, termasuk kakao, padi, jagung, dan kelapa serta pertambangan. Selain itu, sektor perikanan juga berkembang pesat di wilayah pesisirnya. Tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor primer membuat isu-isu pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta akses pasar menjadi isu krusial dalam kampanye.

Politik di Konsel juga dipengaruhi oleh peran partai-partai besar di Sulawesi Tenggara. Koalisi partai, dukungan tokoh masyarakat, hingga basis massa tradisional menjadi faktor penentu dalam perebutan suara. Dengan latar belakang masyarakat yang heterogen (pesisir, pedalaman, dan perkotaan), kandidat harus mampu merangkul berbagai kelompok untuk memenangkan simpati publik.

Dengan tidak majunya petahana Surunuddin Dangga setelah dua periode, Pilkada 2024 menghadirkan empat pasangan calon yang bersaing ketat. Dari proses yang panjang, akhirnya pasangan Irham Kalenggo – Wahyu Ade Pratama keluar sebagai pemenang dan ditetapkan untuk memimpin Konsel 2025–2030.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh responden, terlihat bahwa mayoritas responden mengakui pernah menerima tawaran politik uang dalam bentuk uang atau barang. Sebagian responden menilai bahwa praktik politik uang dianggap wajar, meskipun terdapat juga yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kualitas demokrasi. Pola politik uang yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan meliputi pembagian uang tunai, pemberian sembako, dan janji bantuan proyek. Pola distribusi ini dilakukan melalui tim sukses yang menysasar masyarakat ekonomi lemah. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menekankan hubungan erat antara kondisi ekonomi pemilih dan kerentanan terhadap politik uang.

Praktik politik uang di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa pembagian uang tunai merupakan pola yang paling dominan. Responden dalam penelitian ini umumnya mengakui pernah mendengar atau menyaksikan praktik pemberian uang langsung dari calon maupun melalui tim sukses. Jumlah uang yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000 per orang, tergantung pada segmen pemilih yang ditargetkan.

Pola ini biasanya terjadi menjelang hari pemungutan suara. Tim sukses bergerak secara masif di malam sebelum pencoblosan, yang sering disebut sebagai 'serangan fajar'. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya hubungan antara faktor ekonomi dengan kerentanan pemilih terhadap praktik politik uang. Selain itu, uang tunai juga digunakan sebagai strategi kontrol sosial, menimbulkan rasa hutang budi di kalangan pemilih.

Selain uang tunai, pola politik uang di Konawe Selatan juga diwujudkan melalui pemberian sembako. Paket sembako yang dibagikan biasanya berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan terkadang kebutuhan pokok lain. Nilai ekonominya memang tidak sebesar pemberian uang tunai, tetapi strategi ini dianggap lebih efektif untuk menjangkau pemilih rumah tangga. Sembako kerap dikemas dalam bentuk bantuan sosial dengan narasi kepedulian calon terhadap masyarakat. Distribusi dilakukan oleh tim sukses hingga tingkat dusun dan RT. Pola ini menunjukkan pendekatan personal dan emosional. Dalam konteks masyarakat pedesaan di Konawe Selatan, sembako dianggap lebih 'bermanfaat' dibanding uang tunai, terutama bagi ibu rumah tangga.

Bentuk lain dari politik uang adalah janji bantuan proyek yang menysasar kelompok masyarakat tertentu, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, atau organisasi pemuda. Janji tersebut meliputi bantuan pupuk, perahu, modal usaha, hingga pembangunan jalan tani. Pola ini tidak selalu berupa pemberian langsung, tetapi janji akses terhadap program pembangunan jika calon menang. Strategi ini membangun harapan jangka panjang masyarakat terhadap figur calon. Meski demikian, banyak janji proyek yang tidak terealisasi setelah calon terpilih.

Ketiga pola di atas uang tunai, sembako, dan janji proyek memiliki kesamaan dalam mekanisme distribusi, yaitu melalui tim sukses. Distribusi politik uang jarang dilakukan langsung oleh calon karena risiko hukum dan citra negatif. Oleh karena itu, tim sukses yang berperan aktif. Distribusi dilakukan dengan segmentasi: petani/nelayan cenderung menerima janji proyek, ibu rumah tangga menerima sembako, dan pemuda sering mendapat uang tunai. Hal ini menunjukkan adanya kalkulasi politik yang cermat dari pihak calon.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi terdahulu yang menekankan hubungan erat antara kondisi ekonomi pemilih dan kerentanan terhadap politik uang. Di daerah dengan kesejahteraan rendah, politik uang lebih mudah diterima karena masyarakat menempatkan kebutuhan ekonomi jangka pendek sebagai prioritas. Konawe Selatan sebagai daerah agraris menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Rendahnya pendapatan dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah membuat masyarakat lebih rentan. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan: politik uang diterima karena dianggap menguntungkan, sementara calon terus menggunakannya karena terbukti efektif.

Fenomena politik uang di Konawe Selatan menunjukkan praktik ini tidak sekadar persoalan teknis, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya politik lokal. Implikasinya adalah terganggunya kualitas demokrasi, karena pemilih cenderung menentukan pilihan bukan berdasarkan visi atau rekam jejak, melainkan keuntungan materi yang diterima. Dalam jangka panjang, politik uang dapat melahirkan pemerintahan koruptif karena calon merasa perlu mengembalikan modal politik yang telah diinvestasikan.

Sebagian besar menganggap politik uang adalah hal biasa dalam setiap Pilkada. Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang menilai praktik ini merusak nilai demokrasi dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Kabupaten Konawe Selatan menganggap politik uang sebagai fenomena biasa dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.

Anggapan ini muncul karena beberapa alasan: 1) . Budaya politik transaksional. Sejak lama, masyarakat terbiasa menerima pemberian uang atau barang dari calon kepala daerah. Praktik ini dianggap bagian dari “adat politik” lima tahunan yang sulit dihilangkan. 2) Kondisi ekonomi masyarakat. Dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, nelayan, atau pekerjaan informal, kondisi ekonomi yang rentan membuat pemberian uang atau barang dianggap sebagai tambahan rezeki, bukan pelanggaran. 3) Minimnya kesadaran politik. Pendidikan politik masyarakat masih rendah, sehingga pemilih lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada visi, misi, dan program calon. 4) Tidak adanya sanksi sosial. Meski politik uang dilarang secara hukum, masyarakat tidak menganggapnya sebagai hal memalukan. Tidak ada stigma negatif bagi penerima, bahkan terkadang dianggap sebagai hak yang pantas diterima.

Dalam wawancara dengan responden, muncul ungkapan seperti tidak ada calon yang tidak memberi uang, jadi semua sama saja. Pernyataan semacam ini mencerminkan sikap permisif dan pragmatis. Politik uang dipandang sebagai sesuatu yang normal, bukan pelanggaran serius. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang lebih kritis. Mereka menilai praktik politik uang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. Persepsi ini umumnya dimiliki oleh kalangan muda terdidik, aktivis masyarakat sipil, dan sebagian pegawai negeri sipil. Mereka menilai politik uang mengakibatkan: 1) Merusak nilai demokrasi. Demokrasi seharusnya dilandaskan pada prinsip kesetaraan dan rasionalitas, di mana pemilih menentukan pilihan berdasarkan program, integritas, dan kapasitas calon. Politik uang justru mereduksi demokrasi menjadi transaksi jual-beli suara. 2) Menghasilkan pemimpin tidak berkualitas. Pemimpin yang terpilih karena uang lebih cenderung berorientasi mengembalikan “modal politik” ketimbang menjalankan visi pembangunan. Hal ini memperbesar potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik. 3) Meningkatkan ketidakadilan politik. Politik uang hanya menguntungkan calon dengan sumber daya finansial besar, sehingga calon yang sebenarnya berintegritas tetapi miskin dana sulit bersaing. Akibatnya, kualitas kompetisi politik menurun. 4) Menurunkan partisipasi kritis masyarakat. Ketika masyarakat terbiasa menerima uang, mereka cenderung apatis terhadap kebijakan publik setelah pemilu selesai. Hubungan antara pemimpin dan rakyat berhenti pada titik transaksi, bukan partisipasi berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Masyarakat; 1). Tingkat Pendidikan; 2) Kondisi ekonomi; 3) Pengalaman politik; 4). Pengaruh lingkungan sosial. Analisis terhadap persepsi masyarakat menunjukkan bahwa politik uang bukan hanya soal praktik ilegal, tetapi juga soal penerimaan sosial. Ketika mayoritas masyarakat menganggap politik uang sebagai hal biasa, maka sistem demokrasi di tingkat lokal akan terus berada dalam lingkaran yang rapuh.

Implikasi dari kondisi ini adalah; Legitimasi lemah; Pemimpin yang terpilih melalui politik uang kurang memiliki legitimasi moral di mata masyarakat kritis; Pemerintahan berorientasi modal; Kepala daerah cenderung memprioritaskan pengembalian biaya politik daripada kepentingan publik; Keterbatasan regenerasi politik. Calon dengan kapasitas tetapi miskin modal sulit tampil, sehingga demokrasi kehilangan kesempatan menghadirkan pemimpin berkualitas; Budaya permisif berulang; Jika tidak ada intervensi kuat dari lembaga pengawas dan pendidikan politik, pola ini akan terus berulang pada pemilu berikutnya.

Untuk mengubah persepsi masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis antara lain pendidikan politik berkelanjutan dimana KPU, Bawaslu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil harus aktif memberikan pendidikan politik agar masyarakat memahami dampak buruk politik uang. Selain itu, Penegakan hukum yang konsisten. Bawaslu harus berani menindak tegas pelaku politik uang. Konsistensi ini penting untuk menimbulkan efek jera.

Disisi lain pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap politik uang hanya mungkin dilakukan jika kondisi ekonomi mereka lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan menjadi syarat mutlak. Gerakan sosial masyarakat sipil perlu digerakan. Aktivis dan tokoh lokal perlu mendorong gerakan moral yang menolak politik uang, sehingga muncul norma sosial baru yang memalukan bagi penerima maupun pemberi

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Politik uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan dilakukan dengan berbagai pola, seperti pembagian uang tunai dan barang.

2. Sebagian besar responden menganggap politik uang adalah hal biasa, meskipun ada yang menilai praktik ini merusak demokrasi.
3. Politik uang berdampak negatif pada kualitas demokrasi dan legitimasi pemimpin terpilih.
4. Persepsi masyarakat Konawe Selatan terhadap politik uang terbagi dua yaitu mayoritas permisif yang menganggapnya sebagai hal biasa dalam Pilkada, dan minoritas kritis yang menilai politik uang merusak demokrasi serta menghasilkan pemimpin tidak berkualitas.
5. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Selatan yaitu tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, pengalaman politik dan pengaruh lingkungan sosial.

## E. Referensi

- Fitriyyah, M. U., Astuti, A. W., Umam, M. S., & Ningsih, R. L. W. (2021). Implikasi Demokrasi Semu dan Politik Pencitraan Berbingkai Islam Terhadap Good Governance. *Politea*, 4(1).
- Hamson, Z. (2021). Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan Money Politics In Indonesian Election: An Overview. *Journal of Communication Sciences*, 4(1), 36-44.
- Irawan, D. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan. *GeJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1725-1738.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Third Edition.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Surbakti, R. (2009). *Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagan Baru*. Diterbitkan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wibawana, W. A. (2024). Berapa Daerah yang Ikut Pilkada Serentak.